

AKUNTABILITAS PENDIDIKAN

As'ari Djohar

I. Akuntabilitas Pendidikan LPTK PGSMK

a. Akuntabilitas pendidikan adalah suatu perwujudan kewajiban dari Lembaga Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi pendidikannya dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas pendidikan dapat diartikan juga memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan dalam melaksanakan program pendidikannya kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Dalam konteks itu, LPTK-PGSMK sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kependidikan di bidang kejuruan harus memberikan pertanggung jawaban kepada orang tua mahasiswa, lembaga legislatif, badan-badan pemerintah, organisasi pemberi dana, masyarakat profesi, pembayar pajak yang kesemuanya itu menjadi *stakeholders* LPTK PGSMK.

c. Apa yang harus dipertanggung jawabkan?. Dalam akuntabilitas pendidikan lembaga pendidikan harus mempertanggung jawabkan keseluruhan aspek tingkah laku organisasi yakni:

- 1) prilaku internal: meliputi **perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi program** termasuk proses pendayagunaan sumberdaya, koordinasi kerja dlsb,
- 2) prilaku eksternal organisasi meliputi pelaksanaan program pendidikan yang melibatkan unsur masyarakat pihak kedua, dalam hal ini berkaitan dengan **kualitas lulusannya** yang berkiprah di masyarakat.

II. Prinsip-prinsip akuntabilitas pendidikan.

Dalam melaksanakan akuntabilitas pendidikan, lembaga pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pendidikan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

6. Akuntabilitas harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
7. Dalam pelaksanaan akuntabilitas, diperlukan perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja.

III. Siapa yang memberikan penilaian terhadap akuntabilitas.

Untuk mengetahui apakah lembaga pendidikan dalam melaksanakan Visi dan misinya telah akuntabel, maka perlu dilakukan proses evaluasi. Siapa saja yang sepantasnya dilibatkan sebagai penilai akuntabilitas?. Paling tidak ada tiga unsur yang mutlak harus terlibat dalam penilaian ini yakni:

- a. Pemerintah; yakni unsur yang memberi wewenang dan dana kepada LPTK PGSMK untuk melaksanakan Visi dan misinya menyiapkan tenaga kependidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam hal ini pemerintah (Inspektorat jendral, BPKP dan atau BPK) melakukan penilaian terhadap kebijakan, proses pendidikan dan hasil lulusan, dan penggunaan sumberdaya serta dana yang dikelola LPTK PGSMK. Evaluasi ini dilaksanakan minimal setiap semester satu kali, terkoordinir sehingga tidak terkesan tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi yang lain.
- b. Organisasi profesi; yang memiliki standar-standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di bidang pendidikan kejuruan. Organisasi profesi pendidikan kejuruan dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan profesional lulusan LPTK PGSMK yang telah menyandang profesi, minimal 5 tahun sekali secara berkala. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seseorang lulusan apakah masih layak menyandang profesi kependidikan kejuruan (guru/tenaga kependidikan non guru).
- c. Unsur masyarakat pengguna; yakni masyarakat persekolahan, masyarakat diklat industri, masyarakat yang bergerak di bidang kursus-kursus dan masyarakat industri, melakukan penilaian secara berkala dan berkelanjutan terhadap kemampuan lulusan yang baru dari LPTK-PGSMK, guna melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan unsur masyarakat pengguna.

Dengan penilai yang terdiri dari ketiga unsur itu, diharapkan akuntabilitas LPTK dapat dipertanggungjawabkan

IV. Strategi yang perlu dilakukan LPTK PGSMK

Strategi yang dapat dilakukan oleh LPTK PGSMK dalam upaya pelaksanaan program yang akuntabel adalah: penerapan TQM dalam pendidikan secara konsisten, optimalisasi kinerja dan penegakkan legalitas untuk tegaknya proses pendidikan.

- a). Penerapan *Total Quality Management (TQM)* dalam Pendidikan Secara Konsisten, merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh LPTK PGSMK dalam melakukan akuntabilitas pendidikannya, agar kebijakan yang dikeluarkan, proses pendidikan yang dilakukan dan output yang dihasilkan LPTK PGSMK mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan *customer*.

a.1. TQM merupakan suatu metoda kuantitatif dan pengetahuan untuk memperbaiki material dan jasa sebagai masukan (*input*), memperbaiki semua proses (*proses*), dan memperbaiki upaya guna memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa (*output*)_ pada masa kini dan waktu yang akan datang.

Total disini mempunyai konotasi seluruh sistem yang meliputi seluruh proses, seluruh personil termasuk pemakai produk dan jasa dan supplier. *Quality* berarti karakteristik yang memenuhi kebutuhan pemakai, sedangkan *management* mengandung arti proses komunikasi vertikal dan horizontal, *top-down* dan *bottom-up* guna mencapai mutu dan produktivitas.

Input atau masukan dalam LPTK PGSMK meliputi peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, tenaga kependidikan (dosen) dan lingkungan pendidikan, guna memperbaiki mutu lulusan perlu dilakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan simultan guna dapat menghasilkan output yang mempunyai kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Proses pendidikan dimana dilakukan interaksi peserta didik dengan pendidik dalam konteks pembelajaran perlu selalu diupayakan untuk diperbaiki dan ditingkatkan secara periodik, sehingga proses pembelajaran berlangsung optimal dan meningkatkan mutu lulusannya.

Output atau Lulusan LPTK PGSMK sebagai produk, harus selalu dievaluasi melalui penelusuran dimana mereka mengembangkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Apakah mereka bekerja sesuai dengan bidang ilmunya ? Apakah mereka berkemampuan sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan dimasyarakat pemakai. Apakah mereka mampu dan dapat melaksanakan tugas-tugas baru yang diakibatkan oleh perkembangan iptek/ mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan iptek yang sedemikian pesatnya.

a.2. Dengan digunakannya TQM dalam pendidikan secara konsisten menuntut LPTK PGSMK untuk:

1. Memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan *customer*.
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan dan jangka panjang dalam seluruh proses dan *output* LPTK PGSMK.
3. Mengambil langkah-langkah untuk melibatkan seluruh karyawan dalam upaya memperbaiki mutu.

b). Optimalisasi kinerja.

b.1. Optimalisasi kinerja LPTK PGSMK diartikan sebagai upaya yang dilakukan diseluruh lini organisasi mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai dengan tingkat pelaksana meningkatkan pemanfaatan semua sumberdaya: SDM (Dosen dan tata usaha), material, dana dan waktu dalam; pengambilan kebijakan, proses penyelenggaraan pendidikan dan evaluasi kegiatan agar output atau lulusan yang dihasilkan secara kuantitatif meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan *customer*. Guna mengetahui optimalisasi kinerja dari semua unsur yang terlibat dalam instansi LPTK PGSMK diperlukan adanya pengukuran kinerja.

b.2. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas atau merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja. Untuk melaksanakan kedua hal tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan:

1. Perencanaan strategis yang jelas /tujuan dari suatu program secara jelas.
2. Perencanaan operasional yang terukur; program dirancang sudah dilengkapi dengan indikator kinerja atau keberhasilan pelaksanaan program, sehingga dengan demikian dapat mudah diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

LPTK PGSMK dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program-programnya, jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator capaian yang mengarah pada pencapaian misinya. Tanpa adanya pengukuran kinerja, sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi LPTK PGSMK tersebut. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan strategis yang jelas, perencanaan operasional yang terukur, maka dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak.

b.3. Dua hal yang perlu ditetapkan dalam proses pengukuran kinerja yakni:

1. Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja dari suatu kegiatan/program.

Penetapan indikator kinerja tersebut meliputi aspek masukan (*input*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*), serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukkan proses manajemen kegiatan yang terjadi. Indikator kinerja *input* dan *output* dapat dinilai serempak setelah kegiatan yang dilakukan selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator *outcomes*, *benefit* dan *impact*, baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

2. Penetapan Capaian Kinerja.

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja, tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah *input* menjadi *output*, atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian dan keselarasan antara kegiatan dengan program, atau antara program dengan program utama, atau antara program yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, atau antara kebijakan instansi pendidikan yang lebih rendah dengan kebijakan instansi pendidikan yang lebih tinggi, sebaiknya digunakan formulir pengukuran kinerja (FPK). Formulir itu bisa dibuat dalam tiga bentuk yakni FPK-1 yaitu untuk pengukuran kinerja kegiatan, FPK-2 untuk pengukuran kinerja program dan FPK-3 untuk pengukuran kinerja kebijakan.

c) Penegakan legalitas untuk tegaknya proses pendidikan.

Akuntabilitas pendidikan dapat dilakukan dan dilaksanakan secara konsisten melalui strategi ketiga yakni penegakan legalitas. Guna tegaknya proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi harapan masyarakat, aspek legalitas merupakan syarat mutlak yang harus ditegakkan.

Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan mulai dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan keputusan-keputusan lainnya harus benar-benar dipedomani dan ditaati untuk dilaksanakan secara benar dan konsisten. Dengan demikian maka penyelenggaraan pendidikan memiliki pijakan yang jelas dan sama, sehingga akuntabilitas pendidikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berakibat terhadap kerugian masyarakat dapat kurangi dan dihindarkan dengan menindak tegas terhadap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Bandung; Juli 2006